

Eksistensi Pemerintahan Daerah Kota Kediri dalam Perspektif Otonomi dan Partisipasi Masyarakat

Salma Puspitarini¹, Endang Indartuti¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi asas otonomi dan desentralisasi di Kota Kediri, dengan fokus pada bagaimana kebijakan lokal dirancang dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Analisis menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi Kota Kediri dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan, meskipun tantangan seperti ketergantungan dana pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan desentralisasi, namun tingkat inklusivitasnya perlu ditingkatkan melalui pengembangan literasi digital dan infrastruktur teknologi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pelaksanaan asas otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of autonomy and decentralization principles in Kediri City, focusing on how local policies are designed and executed to address community needs. The analysis highlights that regional autonomy provides flexibility for Kediri City in managing resources and prioritizing development initiatives, although challenges such as dependence on central funding, limited human resources, and regional development disparities remain significant obstacles. Community participation is also a critical aspect of

decentralization, but its inclusivity needs to be enhanced through improved digital literacy and technology infrastructure. Addressing these challenges is expected to optimize the implementation of autonomy and decentralization principles, contributing to sustainable community welfare improvement.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arnawa, 2020). Kota Kediri, sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, menjalankan otonomi daerah dengan penuh tanggung jawab. Dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari wali kota, wakil wali kota, DPRD, serta perangkat daerah lainnya, Kota Kediri berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Asas pemerintahan daerah Kota Kediri sangat penting untuk memahami arah dan prinsip dalam menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Prinsip demokrasi yang diterapkan melalui pemilihan langsung wali kota dan wakil wali kota menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik daerah (Usman, 2011). Selain itu, asas transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Otonomi daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah (Suriadi, Frinaldi, Magriasti, & Yandri, 2024), pelaksanaannya menghadapi kendala seperti ketidakmerataan sumber daya manusia dan kesenjangan antar daerah. Tantangan lain meliputi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Dirja, 2021), serta perlunya memperkuat basis sistem ekonomi nasional dalam menghadapi globalisasi (Hartika, Sholatiyah, & Hasanah, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi pemerintahan daerah Kota Kediri dalam konteks otonomi daerah yang dijalankan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diketahui

*Corresponding author

E-mail addresses: spr2307@gmail.com, endangindartuti@untag-sby.ac.id

bagaimana prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan lokal.

2. METODE

Metode studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang membahas tentang implementasi asas otonomi dan desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta praktik pelaksanaan otonomi daerah, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapinya. Literatur yang dikaji mencakup sumber primer dan sekunder yang terpercaya, dengan fokus pada kasus Kota Kediri sebagai studi spesifik. Analisis dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan relevansi temuan sebelumnya, yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan argumen dan rekomendasi dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Implementasi asas otonomi dan desentralisasi di Kota Kediri mencerminkan langkah maju dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Kebijakan desentralisasi ini memungkinkan pemerintah Kota Kediri merancang dan mengimplementasikan program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Guntoro, 2021). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi lokal dan aspirasi masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran tanpa harus bergantung sepenuhnya pada arahan pemerintah pusat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah Kota Kediri untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemilihan langsung wali kota dan wakil wali kota di Kota Kediri juga menjadi salah satu wujud konkret dari implementasi asas demokrasi yang melekat dalam sistem pemerintahan daerah. Proses ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Melalui pemilihan ini, terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, karena pejabat yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan aspirasi rakyat secara langsung. Mekanisme ini menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat, di mana masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi kinerja pemimpin yang mereka pilih. Dengan adanya pemilihan langsung, pemerintah daerah lebih terdorong untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjalankan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan asas desentralisasi di Kota Kediri. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan prioritas mereka kepada pemerintah. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada realitas dan kebutuhan di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, pemerintah daerah dapat mengurangi kesenjangan antara harapan masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, keberadaan forum konsultasi publik dan saluran komunikasi digital yang dibuka oleh pemerintah semakin memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi, meskipun tantangan dalam hal inklusivitas masih perlu mendapatkan perhatian lebih.

Namun, di balik keberhasilan implementasi asas otonomi dan desentralisasi di Kota Kediri, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar tujuan desentralisasi dapat tercapai secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan lokal, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Kota Kediri masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Ketergantungan ini membuat pemerintah daerah harus berinovasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sekaligus mencari sumber pendapatan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah juga menjadi tantangan yang signifikan (Zam Zam, 2024). Aparatur sipil negara (ASN) di Kota Kediri perlu memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk mengelola berbagai program pembangunan secara efektif.

Tanpa peningkatan kapasitas, kebijakan yang dirancang dapat menghadapi kendala dalam implementasi. Selain itu, rotasi pejabat yang sering terjadi dapat mengganggu kelangsungan program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah daerah menerapkan standar kompetensi dan menyediakan program pelatihan (Nazara, 2020). Namun, tidak semua pegawai negeri sipil dapat beradaptasi dengan program-program ini karena tantangan daerah yang berbeda-beda dalam pengembangan sumber daya manusia.

Diskusi

Meskipun Kota Kediri telah menunjukkan kemajuan dalam menerapkan asas otonomi dan desentralisasi, sejumlah tantangan signifikan masih menjadi penghambat optimalisasi kebijakan ini. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat adalah salah satu isu utama yang dihadapi. Sebagian besar anggaran pembangunan di Kota Kediri masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan spesifik daerah. Meskipun ada peningkatan alokasi, banyak daerah, termasuk Kediri, masih sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) untuk anggaran mereka. Ketergantungan ini bertentangan dengan tujuan kemandirian keuangan daerah (Arbani, 2020). Hal ini membatasi fleksibilitas pemerintah Kota Kediri dalam merancang kebijakan berbasis lokal, karena prioritas pembangunan sering kali harus disesuaikan dengan program nasional yang bersifat umum. Misalnya, pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial yang dirancang di tingkat pusat tidak selalu relevan dengan kondisi riil di Kota Kediri. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta pengelolaan sumber daya lokal secara lebih optimal.

Selain kendala anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah juga menjadi tantangan besar. Aparatur sipil negara (ASN) di Kota Kediri diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan kewenangan otonomi dengan baik. Namun, kenyataannya, masih banyak ASN yang membutuhkan peningkatan kemampuan dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah di era global, yang membutuhkan pengembangan profesional, motivasi, dan perubahan budaya di kalangan pegawai negeri sipil (Yusril Rahman Hakim & M. Nurul Huda Pradana Putra, 2021). Selain itu, rotasi pejabat yang sering terjadi juga memengaruhi kesinambungan program pembangunan yang telah direncanakan. Pergantian pejabat yang terlalu sering dapat menyebabkan kebijakan yang sedang berjalan tidak dilanjutkan atau mengalami perubahan arah, sehingga mengurangi efektivitas program yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri perlu merancang sistem manajemen SDM yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah barat dan timur (Sumirat, 2019). Terlepas dari implementasi kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah yang ada belum efektif dalam mengentaskan daerah tertinggal dan mengatasi kesenjangan regional (Iskandar, 2019). Ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam Kota Kediri juga menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa wilayah dengan potensi ekonomi yang besar cenderung menerima perhatian lebih dalam alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur, sementara wilayah lain yang kurang berkembang sering kali tertinggal. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dalam kota. Oleh karena itu, kebijakan otonomi harus dirancang dengan pendekatan yang lebih adil, memastikan bahwa alokasi sumber daya dan pembangunan merata di seluruh wilayah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal untuk menciptakan pemerataan, baik dalam infrastruktur dasar, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal inklusivitas. Meskipun pemerintah Kota Kediri telah membuka berbagai saluran partisipasi, seperti forum musrenbang dan konsultasi publik, tidak semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif. Kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam akses informasi sering kali tidak mampu menyampaikan aspirasinya. Selain itu, literasi digital yang rendah di sebagian kalangan masyarakat menjadi kendala dalam memanfaatkan platform digital yang disediakan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih dalam meningkatkan literasi digital dan membangun infrastruktur teknologi informasi yang lebih merata. Program pelatihan masyarakat serta penyediaan fasilitas akses internet di wilayah terpencil dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi yang lebih inklusif.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah Kota Kediri dapat memaksimalkan manfaat dari asas otonomi dan desentralisasi. Pengelolaan yang efektif, efisien, dan inklusif tidak hanya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warganya. Implementasi yang lebih baik dari asas ini dapat menjadikan Kota Kediri sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengelola pemerintahan berbasis lokal secara sukses.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi Pemerintahan Daerah Kota Kediri dalam perspektif otonomi dan partisipasi masyarakat menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Meskipun tantangan seperti kesenjangan akses informasi dan partisipasi di beberapa kelompok masyarakat masih ada, pemerintah Kota Kediri terus berupaya membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui forum musrenbang, konsultasi publik, dan inovasi digital. Implementasi asas otonomi daerah yang luas memungkinkan pemerintah Kota Kediri untuk merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sementara partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, T. S. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DAN KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH. *Al-'Adl*, 13(1), 94. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1679>
- Arnawa, I. M. (2020). Analisis Kebijakan Publik Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(1).
- Dirja, I. P. (2021). KENDALA DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.38183>
- Guntoro, M. (2021). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. *CENDEKIA Jaya*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Hartika, B. D., Sholatiyah, I., & Hasanah, N. (2024). Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 888–897. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2665>
- Iskandar, D. A. (2019). JARAK LAYANAN, KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KERAGAMAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *REKA RUANG*, 1(2), 11–23. <https://doi.org/10.33579/rkr.v1i2.1037>
- Nazara, D. K. (2020). PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NIAS. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1(1), 224–233. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.257>
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, 2(2), 270–293. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.45>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.14>
- Yusril Rahman Hakim & M. Nurul Huda Pradana Putra. (2021). INVENTARISASI DAN PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI BKD KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(2), 97–105. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i2.2>
- Zam Zam, Y. (2024). Evaluasi Kompetensi Terhadap Peningkatan Komitmen dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11042–11052. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10335>